



**REVISI
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA SKPD)
2016 - 2021**

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN**



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Alhamdulillah kami telah menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian tugas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Daerah Kabupaten Karimun, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah Aparatur Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang tenaga kerja dan Perindustrian.

Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi OPD untuk menyerahkan pelayanan khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan serta harus mampu menjawab 3 pertanyaan mendasar yaitu:

1. Apa yang harus dicapai oleh OPD dalam 5 (lima) tahun kedepan.
2. Bagaimana cara mencapainya .
3. Langkah-langkah strategi apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Dengan disusunnya Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu kritik dan saran yang sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya kami berharap Revisi Renstra ini nantinya berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Karimun, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Revisi Renstra Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021.

Tg.Balai Karimun, Oktober 2017

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**

Ir. HAZMI YULIANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610129 198903 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan tujuan	4
1.4 Sistematika	4
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD	7
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya	12
2.3 Kinerja Pelayanan	13
2.4 Tantangan dan Peluang	23
BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	26
3.2 Isu - isu Strategis.....	28
3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.4 Penetapan Isu-isu Strategis	35
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	38
4.1 Visi dan Misi	38
4.2 Tujuan dan Sasaran	39
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	43
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	43
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	46
BAB VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan	73



BAB VIII	Penutup	75
-----------------	----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : Daftar Pegawai Menurut Eselon	10
Tabel 2.2 : Daftar Pegawai Menurut Golongan	10
Tabel 2.3 : Daftar Pegawai Menurut Pendidikan	11
Tabel 2.4 : Perbandingan Gol Kepangkatan dengan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 2.5 : Perkembangan APBD	12
Tabel 2.6 : APBD Disnaker 2011 - 2015	12
Tabel 2.7 : Pencapaian Kinerja Pelayanan RPJMD	14
Tabel 2.8 : Perkembangan Data Indikator Ketenagakerjaan	15
Tabel 2.9 : Perkembangan PUK	15
Tabel 2.10 : Penduduk Usia Kerja	16
Tabel 2.11 : Perkembangan Data Penempatan, Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Tenaga Kerja Asing	16
Tabel 2.12 : Perkembangan Data Hubungan Industrial	18
Tabel 2.13 : Data Perlindungan Ketenagakerjaan	19
Tabel 2.14 : Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral	20
Tabel 2.15 : Capaian Kinerja	21
Tabel 2.16 : Capaian IKK	22
Tabel 2.17 : Pelaku Industri Kecil dan Menengah	22
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	41
Tabel 5.1 : Strategi dan Arah Kebijakan	43
Tabel 6.1 : Rencana Program dan Pendanaan	55
Tabel 6.2 : Rencana Kegiatan dan Pendanaan	57
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	73
Tabel 7.2 : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tahun 2016 – 2021	74



DAFTAR GRAFIK

	HAL
Grafik 2.1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi	16
Grafik 2.2 : Pendaftar Pencari Kerja	17
Grafik 2.3 : Jumlah Peserta Pelatihan	18
Grafik 2.4 : Perkembangan Penyelesaian Kasus HI	19
Grafik 2.5 : Perkembangan UMK	20
Grafik 2.6 : Pelaku Industri Kecil dan Menengah	23
Lampiran 1 : Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	76
Lampiran 2 : Pohon Kinerja (Misi 4)	77
Lampiran 3 : Pohon Kinerja (Misi 7)	78



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun ke depan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Karimun 2016 - 2021 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Karimun, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karimun.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik Ketenagakerjaan dan Perindustrian di Kabupaten Karimun, serta dengan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan Perindustrian yang sedang berkembang. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berlandaskan pada beberapa faktor pertimbangan, antara lain :

1. Penetapan kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja RPJMD Tahun 2016 - 2021;
2. Penyelarasan lebih lanjut antara kebijakan horizontal dan vertikal yang terkait dengan ketenagakerjaan dan Perindustrian.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2008 nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;



12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian tugas Dinas Daerah Kabupaten Karimun



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategi Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Merupakan dokumen perencanaan strategi dan prioritas program pembangunan ketenagakerjaan dan Perindustrian lima tahun ke depan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan.
- Memudahkan aparat Pemerintah Kabupaten Karimun, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, serta masyarakat pada umumnya untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan dan Perindustrian selama lima tahun ke depan dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan Perindustrian.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2016-2021 adalah :

- Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan dan Perindustrian lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Karimun serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian.
- Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab Karimun dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja;
- Memberikan pedoman operasional bagi aparat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab Karimun dalam menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan dalam RPJMD Kab Karimun.

1.4 Sistematika

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari:



Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, landasan normatif penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab III. Isu – Isu Strategis

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum masa kini masing – masing bidang dan atau fungsi pemerintahan yang menjadi sektor binaan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun. Di samping statistik sektoral, juga diuraikan statistik tentang proyeksi kondisi yang diharapkan, sehingga kondisi masa kini dapat dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Bab ini dirumuskan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun beserta penjelasannya. Selanjutnya dijabarkan pula ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Pada Bab ini diuraikan tentang rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun beserta penjelasannya.

Bab VI. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



Pada Bab ini diuraikan indikator kinerja Inspektorat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII. Penutup

Bab ini menjelaskan simpulan Revisi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.



2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian tugas Dinas Daerah Kabupaten Karimun, yang melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang ketenagakerjaan dan Perindustrian, sebagaimana dijabarkan di bawah ini :

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun adalah Aparatur Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang tenaga kerja yakni :

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang tenaga kerja dan Perindustrian;
- b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pembangunan dibidang tenaga kerja dan Perindustrian;
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang tenaga kerja dan Perindustrian yang ditugaskan oleh Bupati.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan Teknis dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, sebagai berikut:



1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja, pembinaan hubungan industri;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja, pembinaan hubungan industrial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan kegiatan dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja

Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis operasional penyiapan dan pembinaan teknis hubungan



industri dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan serta pengupahan, dengan uraian tugas yakni :

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional perencanaan pelaksanaan hubungan industri, syarat dan norma kerja;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pembinaan teknis pelaksanaan hubungan industri dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang terhadap pelaksanaan penyiapan dan pembinaan kesejahteraan tenaga kerja;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
- e. Melaksanakan tugas lain di bidang Hubungan industrial yang ditugaskan oleh Kepala Bidang hubungan Industri, Syarat dan Norma kerja.

Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. Seksi Syarat dan Norma Kerja.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja.

4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis di bidang penempatan dan perluasan kerja dalam negeri dan luar negeri, dengan uraian tugas yakni :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis penempatan dan perluasan kerja dalam negeri;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis penempatan dan perluasan kerja luar negeri;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kerja.
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang penempatan dan perluasan kerja yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dalam Negeri;
- b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.

5. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan uraian tugas yakni :

- a. Penyusunan program kerja pada seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi pembinaan teknis pelatihan tenaga kerja;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi pembinaan teknis produktivitas tenaga kerja;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di tugaskan oleh pimpinan.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas terdiri dari :

- c. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
- d. Seksi Produktivitas Tenaga kerja.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6. Bidang Industri

Kepala Bidang Industri membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas mempersiapkan bahan dan merumus kebijakan teknis, operasional, bimbingan usaha, sarana produksi pengawasan dan pengembangan usaha di bidang industri, dengan uraian tugas yakni :

- a. Melakukan perencanaan teknis operasional dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha industri;



- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha industri makanan, minuman, agro, hasil hutan, kerajinan, logam, mesin,elektronika dan aneka industri.
- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan industri dan pengembangan usaha industri;
- d. Pelaksanaan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian dibidang industri;
- f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait untuk kelancaran tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan pengembangan indutri.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang perindustrian dan perdagangan yan ditugaskan oleh kepala dinas.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, yang melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana dijabarkan di bawah ini :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 2. Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja yang terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - b. Seksi Syarat dan Norma Kerja.
- 3. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja yang terdiri dari :
 - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dalam Negeri.
 - b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri.
- 4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja.
 - b. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
- 5. Bidang Industri yang terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Kecil dan Menengah.
 - b. Seksi Industri Besar



2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun posisi Desember 2016 berjumlah 27 orang, laki-laki 15 orang dan perempuan 12 orang. Sementara untuk Pegawai PTT berjumlah 17 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil terdiri dari satu orang pejabat struktural eselon II, Eselon III 5 orang, jabatan , dan yang menduduki jabatan eselon IV berjumlah 9 orang, serta IV. sebagaimana disusun dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Menurut Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	II	1 Orang
2	Sekretaris	III	1 Orang
3	Kepala Bidang	III	4 Orang
4	Kepala Sub bagian/Kepala Seksi	IV	9 Orang
5	Fungsional	-	-

Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kab Karimun didominasi oleh golongan III, sebanyak 44,4% dari jumlah seluruh pegawai, yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan V	6 Orang
2	Golongan III	12 Orang
3	Golongan II	9 Orang
4	Golongan I	-
Jumlah Pegawai (PNS)		27 Orang

Apabila jumlah pegawai disusun berdasarkan pendidikan, maka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :



Tabel 2.3
Daftar Pegawai Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S.2	2 Orang
2	S.1	15 Orang
3	D III	1 Orang
4	SLTA	9 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah Pegawai (PNS)		27 Orang

Pegawai berdasarkan golongan kepangkatan apabila dibandingkan dengan tingkat pendidikannya, seperti dalam tabel ini :

Tabel 2.4
Perbandingan Golongan Kepangkatan dengan Tingkat Pendidikan
Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kab Karimun

Golongan	Jumlah	Persen	Pendidikan	Jumlah	Persen
Gol IV	6 Orang	22,2%	S.2	2 Orang	7,4%
Gol III	12 Orang	44,4%	S.1/D.III	16 Orang	59,2%
Gol II	9 Orang	33,3%	SLTA	9 Orang	33,3%
Gol I	-	-	SLTP	-	-
Jumlah	27 Orang	100%	Jumlah	27 Orang	100%

Dari komposisi tabel di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang menonjol antara Pegawai golongan II ke golongan III, dibandingkan dengan tingkat pendidikan antara SLTA ke S.1/D.III. Golongan II sejumlah 33,3% dan yang berpendidikan SLTA 33,3%, sedangkan golongan III mencapai 44,4% serta berpendidikan S.1/D.III mencapai 59,2,6%.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab Karimun

2.3.1 Kinerja Keuangan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun didukung dengan anggaran berbasis kinerja, maksudnya adalah setiap unit kerja mengelola anggaran untuk mendanai program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perkembangan APBD dari Tahun 2011 - 2015 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.5
Perkembangan APBD
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2015

No	Tahun	Jumlah (Rp.)	Naik/Turun (%)	Belanja Pegawai /BTL (Gaji/TPP)	Jumlah Belanja Langsung /BL
1	2011	4,916,989,500,-		2,050,984,500,-	2,866,005,000,-
2	2012	4,584,550,000,-	Turun 7%	2,030,059,000,-	2,554,491,000,-
3	2013	5,462,366,700,-	Naik 19,5%	2,153,002,000,-	3,309,364,700,-
4	2014	6,460,075,025,-	Naik 18,27%	2,407,575,026,-	4,052,500,000,-
5	2015	6,748,347,200,-	Naik 4,46%	2,567,319,000,-	4,181,028,200,-

Jumlah APBD Dinas Tenaga Kerja setiap tahunnya rata-rata meningkat terus, paling signifikan adalah penambahan anggaran pada tahun 2013 sebesar 19,5% dan tahun 2014 yaitu sebesar 18,27%, angka ini merupakan penambahan anggaran untuk program dan kegiatan pelayanan publik, prioritas pada program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta program peningkatan kesempatan kerja.

Rincian alokasi anggaran sesuai dengan program, sebagai berikut :

Tabel 2.6
APBD Dinas Tenaga Kerja Kab Karimun Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah	Non Urusan	Urusan Wajib	
			Peningk.Kualitas & Prod. Tenaga Kerja	Peningk Kesempatan Kerja
2011	2,866,005,000,-	1,518,100,000,-	650,000,000,-	697,905,000,-
2012	2,554,491,000,-	2,004,491,000,-	550,000,000,-	-
2013	3,309,364,700,-	1,969,491,000,-	1,239,873,700,-	100,000,000,-
2014	4,052,500,000,-	2,883,208,000,-	1,007,292,000,-	162,000,000,-
2015	4,181,028,200,-	2,968,039,300	525,000,000,-	687,988,900,-

2.3.2 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah daerah, yaitu Indikator Kinerja RPJMD, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kunci. Adapun tabel yang disajikan dengan Format sebagai berikut:



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan RPJMD
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun
Tahun 2011 – 2015

No	Aspek/Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I	KETENAGAKERJAAN																
1	Ketersediaan BLK	Tempat	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah Tenaga Kerja Lokal Terampil dan Tersertifikasi	Orang	363	486	609	732	855	60	100	185	295	340	17	21	30	40	40
3	Pencari kerja lokal yang ditempatkan	Orang	1275	1575	1975	2425	3005	800	2773	3521	4041	4927	63	176	178	166	164
4	Rasio tenaga kerja lokal yang disalurkan melalui Pemda per tahun	%	40	45	55	65	75	62	45	0	0	0	155	222	0	0	0
5	Jumlah lulusan pendidikan vokasional tersertifikasi	Orang	363	486	609	732	855	60	100	185	295	340	17	21	30	40	40
6	Presentase tenaga kerja lokal terhadap tenaga kerja di sektor industri	%	68	69	70	71	71	72	85	13	172	176	103	123	19	242	238



Struktur umur merupakan informasi yang sangat penting berkaitan dengan perkembangan persentase kelompok sasaran pembangunan, dan Proporsi penduduk usia kerja (produktif) menentukan tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Karimun. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Karimun pada Tahun 2015 berdasarkan data Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 155.137. Orang, dari jumlah tersebut angkatan kerja sebanyak 91.902 orang, dan yang bekerja jumlahnya mencapai 86.673 orang, berarti Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Karimun sebesar 5.69% atau Tingkat Pengangguran Terbuka 5,69% Berikut ini disajikan tabel data indikator makro ketenagakerjaan di Kabupaten Karimun :

Tabel 2.8
Perkembangan Data Indikator Ketenagakerjaan
Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2015

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK)	Jiwa	159.095	164.954	160.792	153.130	155.137
Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	105.137	97.252	100.370	97.964	91.902
Jumlah Bekerja	Jiwa	97.406	91.740	95.138	91.461	86.673
Jumlah Penganggur	Jiwa	7.231	5.512	5.232	6.503	5.229
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,88	5,67	5,21	6,64	5,69
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,08	52,15	62,43	63,97	59,24

Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Karimun Tahun 2015 menurut jenis kelamin sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Perkembangan Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Karimun
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2015

Jenis Kelamin	2011	2012	2013	2014	2015
Laki-laki	79.174	84.188	82.235	77.960	78.940
Perempuan	79.921	80.766	78.537	79.170	76.197
Jumlah	159.095	164.954	160.772	153.130	155.137

Menurut golongan umur, penduduk usia kerja tahun 2015 seperti tabel di bawah :

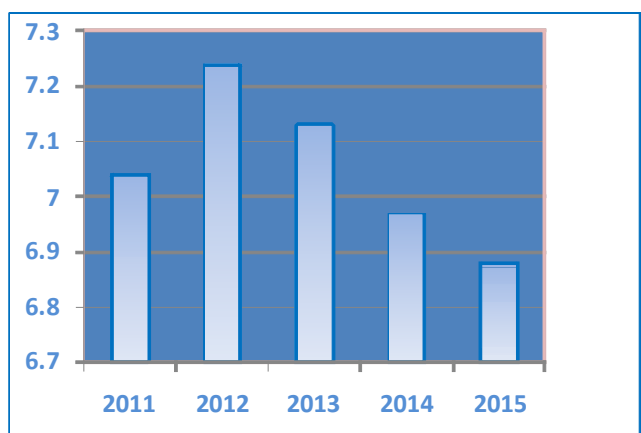


Tabel 2.10
Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Karimun
menurut Golongan Umur pada Tahun 2015

Penduduk Usia Kerja								
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	55-59	TOTAL
20.021	18.889	21.447	24.559	23.669	18.997	17.779	9.776	155.137

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Karimun cenderung positif mengalami penurunan, hal ini penyebab kondisi ekonomi dan politik nasional akan sangat berpengaruh dan berdampak pada fluktuasi kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan. Untuk itu laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun dari tahun 2011 s.d tahun 2015 sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kab Karimun Tahun 2011 s.d 2015



Sementara Perkembangan Kinerja Pelayanan penempatan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Perkembangan Data Penempatan, Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Tenaga
Kerja Asing, Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2015

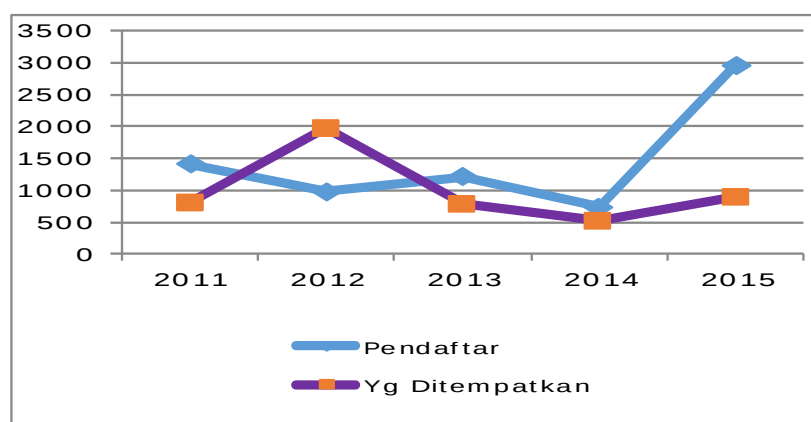
Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	800	1973	784	520	886
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Orang	1406	984	1212	737	2953
Jumlah Lowongan Kerja	Loker	520	821	650	350	1500
Jumlah Tenaga Kerja Asing	Orang	167	220	143	831	923



Tenaga kerja merupakan sumber daya paling utama dalam siklus perputaran roda perekonomian. Ketidakseimbangan antara lowongan kerja pada tahun 2015 sedangkan jumlah pencari kerja mencapai 2.953 orang, hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat kualitas tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja, juga kurang diminatinya lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan kepada para pencari kerja. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan keterampilan untuk peningkatan kualitas pencari kerja, dan pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja.

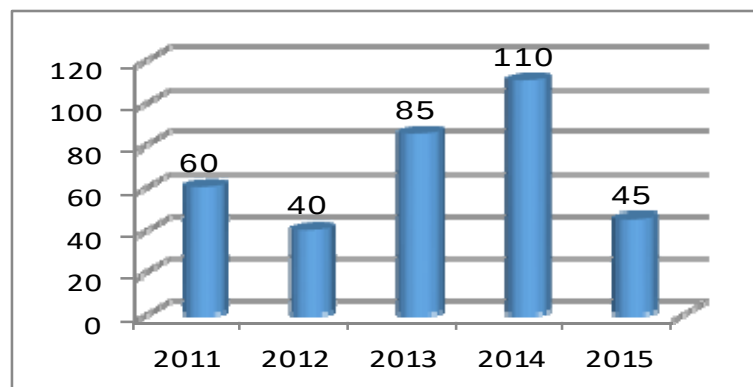
Pada umumnya ketidakseimbangan antara penempatan tenaga kerja, lowongan kerja yang tersedia, tingginya jumlah pencari kerja terjadi setiap tahun, kecuali pada tahun 2012 seperti digambarkan dalam grafik di bawah :

Grafik 2.2
Perbandingan pendaftar pencari kerja
dan penempatan tenaga kerja Tahun 2011 – 2015



Ketidak seimbangan antara Penempatan Kerja dan Lowongan Kerja, salah satu faktornya adalah rendahnya kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja, oleh karena itu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja menjadi salah program prioritas Dinas Tenaga Kerja, dengan berbagai pelatihan kerja berbasis masyarakat, baik yang berbasis kompetensi kerja, maupun pelatihan kewirausahaan, diantaranya adalah pelatihan : Pelatihan Las dasar/lanjutan, Pelatihan Gada PRATAMA (SATPAM), Pelatihan dan Sertifikasi SIO, Pelatihan Welder, Menjahit, Kompetensi profesi di bidang perhotel, Rigger, Fitter, Mekanik, elektro, Tata boga. Jumlahnya setiap tahun sebagaimana digambarkan grafik di bawah ini:

Grafik 2.3
Jumlah Peserta Pelatihan
Dinas Tenaga Kerja Tahun 2011 - 2015



Pada akhir Tahun 2015 jumlah perselisihan hubungan industrial terdaftar tidak berbeda pada tahun-tahun sebelumnya serta kasus yang bisa diselesaikan secara bipartit persentasenya meningkat.

Isu ketenagakerjaan yang perlu penanganan secara sinergi diantara stake holder pemerintah Kab Karimun, antara lain: tingginya angka pengangguran, tingginya angka kecelakaan kerja terutama kecelakaan ditempat kerja meningkatnya konflik hubungan industrial, rendahnya daya saing dan kualitas SDM, serta rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja. Hal ini cukup penting untuk menjadi perhatian semua pihak, mengingat bahwa pembangunan di semua sektor pada akhirnya akan berimplikasi terhadap ketenagakerjaan.

Permasalahan ketenagakerjaan tidak lepas pula dari masalah hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang mempekerjakan mereka, diantaranya masalah perselisihan upah, jam kerja, dan perselisihan kepentingan. Berikut adalah tabel yang menyajikan beberapa indikator ketenagakerjaan terkait hubungan industrial di Kabupaten Karimun :

Tabel 2.12
Perkembangan Data Hubungan Industrial, dan
Pengawasan Ketenagakerjaan Kab Karimun Tahun 2011 – 2015

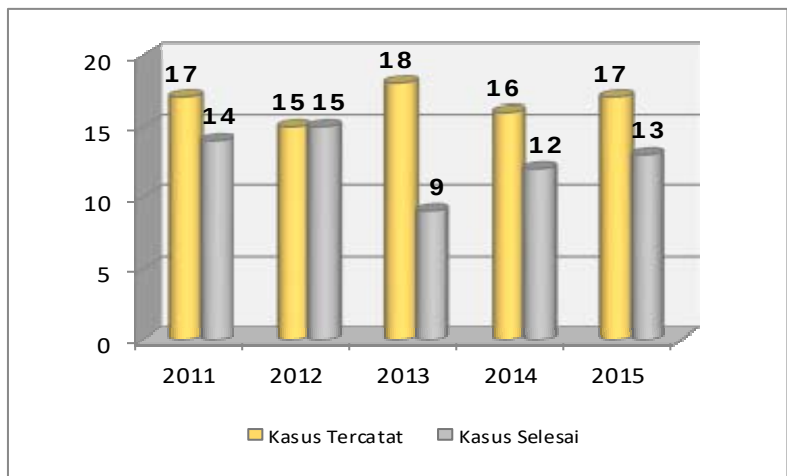
Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	Kasus	14	15	9	12	13
Jumlah Kasus Tercatat	Kasus	17	15	18	16	17
Jumlah Perusahaan	Perusahaan	175	198	220	259	299
Jumlah Pekerja/Buruh yang masuk jamsostek	Orang	2231	2561	2872	3277	3742



Jumlah Kecelakaan tempat kerja	Orang	36	70	100	82	164
--------------------------------	-------	----	----	-----	----	-----

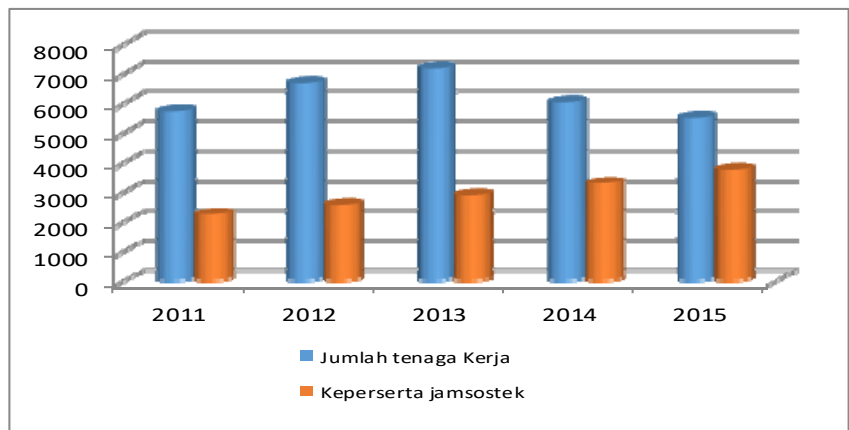
Grafik di bawah ini menggambarkan penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab Karimun selama tahun 2011 - 2015 :

Grafik 2.4
Perkembangan Penyelesaian Kasus HI Tahun 2011 - 2015



Selanjutnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para pekerja dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewajiban melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap perusahaan agar semua pekerja/buruh didaftarkan dalam penjaminan sosial ketenagakerjaan, grafik di bawah ini menunjukkan masih rendahnya kepesertaan pekerja/buruh untuk menjadi anggota jamsostek. Berikut perkembangan kepesertaan tenaga kerja akan jaminan sosial tenaga kerja :

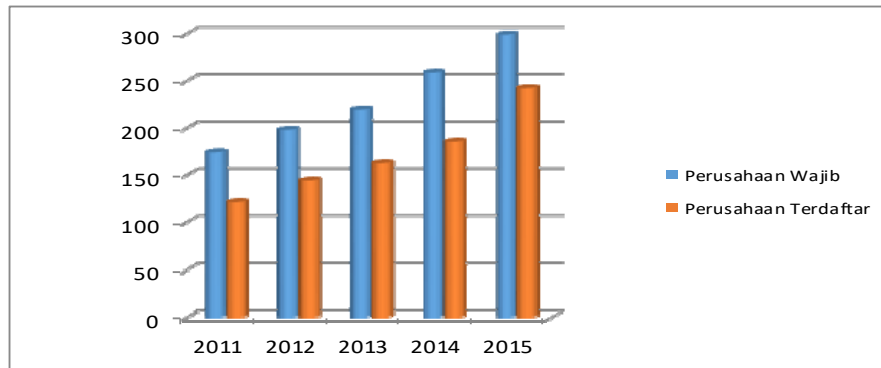
Grafik 2.5
Perkembangan Tenaga Kerja
yang mengikuti Jamsostek Tahun 2011 - 2015





Penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengawas Ketenagakerjaan, setiap tahun dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang telah melakukan wajib lapor berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, dan hasilnya sebagaimana grafik di bawah ini :

Grafik 2.6
Perkembangan Perusahaan yang terdaftar Tahun 2011 – 2015



Organisasi serikat pekerja/buruh merupakan mitra pemerintah dan perusahaan dalam upaya memfasilitasi perlindungan tenaga kerja, namun kecelakaan kerja dan pelanggaran norma ketenagakerjaan masih tetap tinggi, datanya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Data Perlindungan Ketenagakerjaan Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Organisasi Serikat Pekerja/serikat Buruh	SP/SB	8	12	11	17	25
	Federasi		2	2	2	2	2
2	Jumlah orang bekerja (Wajib Lapor)	Orang	5723	6676	7148	6011	7423
3	Jumlah Perusahaan yang masuk Jamsostek	Perusahaan	122	144	163	185	242
4	Jumlah perselisihan hubungan industrial	Kasus	17	15	18	16	17
5	Jumlah Kecelakaan Kerja	Orang	36	70	100	82	164

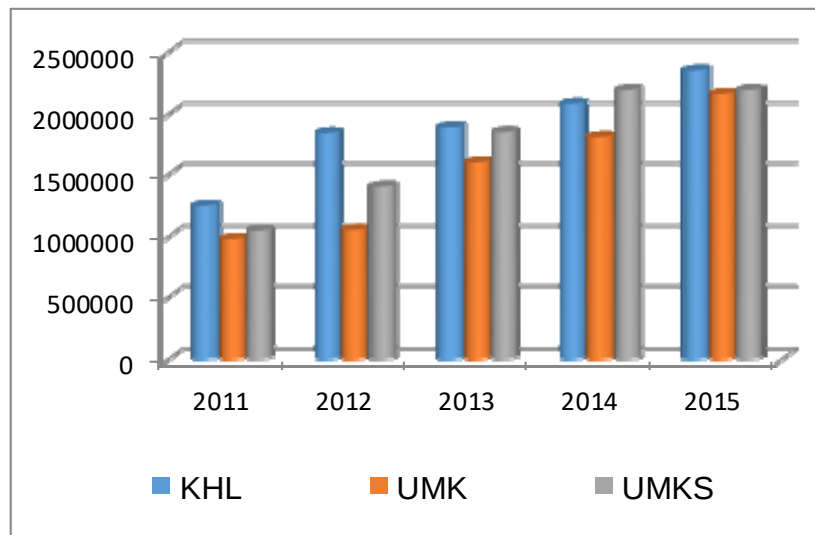
Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, salah satu upaya pemerintah melalui penetapan peningkatan upah minimum kabupaten sesuai atau di atas nilai kebutuhan hidup yang layak.



Namun demikian tentunya tingkat upah akan berbanding lurus dengan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, serta diperkirakan masih banyak perusahaan menerima upah belum sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Karimun (UMK), Tahun 2016 sebesar Rp 2.168.836,-

Penetapan Upah Minimum kabupaten (UMK) melalui mekanisme Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Karimun dalam menentukan kesepakatan UMK, dengan nilai Kebutuhan Hidup Minimum/Layak (KHM/KHL) sebesar Rp 2.363.000 Berikut Perkembangan Upah minimum kabupaten karimun :

Grafik 2.7
Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Karimun
Tahun 2011 – 2015



Data tersebut di atas digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun. Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja kabupaten karimun diukur berdasarkan beberapa indikator :

- Pertama : Indikator Kinerja Sasaran RPJMD dan IKU Tahun 2011 – 2015
- Kedua : Indikator target sasaran dan program Renstra
- Ketiga : Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketenagakerjaan
- Keempat : Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.14
Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun
Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2011 - 2015

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelayanan Pelatihan kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	64	65	73	77	77



		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60	67	66	70	72
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	65	68	72	73	76
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	56,89	200	64,68	70,55	30
3	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	82,35	100	50	75	76,47
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	38,98	38,36	40,17	54,51	67,91
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100	100	100	100	100
		Besaran pengujian peralatan di perusahaan	100	100	100	100	100

Tabel 2.15
Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2011 – 2015

No	Urusan Wajib	IKK	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketenagakerjaan	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,08	52,15	62,43	63,97	59,24
		Pencari kerja yang Ditempatkan	800	1973	784	520	886



Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi khususnya pada sector industry, menunjukkan bahwa peningkatan pelaku industri dan menengah (IKM) di Kab Karimun sangat baik, gairah untuk terus berusaha secara mandiri (berwirausaha) di masyarakat sangat tinggi sehingga tumbuhlah pelaku-pelaku usaha baru.

Pelaku usaha yang paling dominan/menonjol di kabupaten karimun adalah indsutri pengolahan ikan menjadi aneka produk pangan antara lain : Kerupuk Ikan (Kemplang) dan kerupuk potong. Hasil Pendataan dan pendampingan kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di kabupaten karimun kami sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.16
Pelaku Industri Kecil dan Menengah
Di Kabupaten Karimun

No	Kecamatan	Industri Kecil dan Menengah		Peningkatan / Penurunan
		2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Karimun	142	153	11
2	Meral/Meral Barat	177	185	8
3	Tebing	142	159	17
4	Kundur	130	141	11
5	Kundur Barat	45	63	18
6	Kundur Utara	58	61	3
7	Buru	52	55	3
8	Moro	82	93	11
9	Durai	23	29	6
10	Belat	18	16	-2
11	Ungar	62	70	8
Jumlah		931	1025	212

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Karimun pada tahun 2015 bertambah sebanyak 212 atau realisasi target sebesar 75,9% dari target yang ditetapkan yang paling dominan pertumbuhannya adalah di Kecamatan Kundur Barat yaitu sebesar 18 pelaku usaha. Ini di karenakan Kecamatan Kundur Barat merupakan salah satu kecamatan yang cukup berkembang dengan pesat infrastrukturnya, sehingga mudah mendorong pelaku usaha kecil dan pengembangan usahanya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Sehubungan dengan dinamika lingkungan strategis yang terkait ketenagakerjaan dan perindustrian bahwa tantangan pengembangan layanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun lima tahun mendatang baik dalam aspek akses

(keterjangkauan) layanan, kualitas layanan maupun tata kelola layanan cukup besar. Besarnya tantangan pengembangan layanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kabupaten Karimun tersebut mengingat :

1. Semaraknya investor yang masuk di Kabupaten karimun berarti Populasi pencari kerja lokal di Kabupaten Karimun akan semakin meningkat. Meningkatnya populasi pencari kerja tersebut jelas merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun baik dalam hal akses informasi, penempatan, pelatihan, pemagangan, sertifikasi kompetensi dan lain-lain. Layanan tersebut bahkan harus sangat luas cakupan dan intensitasnya karena latar belakang dan karakteristik pencari kerja di kabupaten karimun sangat beragam, baik pendidikan, motivasi, harapan dan lain-lain.
2. Angkatan Kerja di Kabupaten Karimun sangat besar demikian juga jumlah dan jenis perusahaan di wilayah Kabupaten Karimun. Besarnya Angkatan Kerja dan juga jumlah perusahaan di wilayah ini tentu memerlukan jenis dan intensitas layanan yang memadai dan proporsional, khususnya dalam hal pengawasan, pembinaan, perlindungan, kesejahteraan dan layanan hak-hak tenaga kerja lainnya.
3. Akses tenaga kerja di Kabupaten Karimun terhadap informasi dan dinamika lingkungan sangatlah besar diantaranya kebijakan pemerintah (misalnya Upah Minimum Kabupaten) dan berbagai aspek hubungan industrial lainnya. Dengan perkataan lain tenaga kerja di Kabupaten Karimun relative lebih “melek informasi” dan cenderung lebih “peka” terhadap tuntutan nasib, hal ini tentu memerlukan penanganan yang cerdas dari Pemerintah Kabupaten Karimun cq.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.
4. Perhatian masyarakat luas (termasuk media dan lembaga swadaya masyarakat) terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Karimun terkait ketenagakerjaan sangat besar termasuk dalam hal penempatan calon tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, implementasi sistem alih daya (*out sourcing*) dan upah minimum kabupaten (UMK). Hal ini tentu memerlukan peningkatan layanan dan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun sungguh-sungguh dan progresif dalam rangka mewujudkan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam kaitan ini undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamatkan agar seluruh lembaga publik, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun melakukan peningkatan pelayanan publik secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka setiap lembaga publik termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun juga wajib membangun sistem layanan informasi yang handal dan siap merespon permintaan informasi dari masyarakat. Hal ini tentu



memerlukan pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, program serta penyiapan berbagai *Standar Operation Procedures (SOP)*.

Sebagaimana penjelasan diatas untuk itu ANALISIS SWOT Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian untuk lima tahun kedepan yakni :

1. KEKUATAN (STRENGTH).
 - a. Adanya Sumber Dana.
 - b. Undang-Undang No.53 Tahun 1999.
 - c. Adanya dukungan dari pihak Executive dan Legislatif.
2. KELEMAHAN (WEAKNESS).
 - a. SDM Aparatur masih rendah..
 - b. Belum adanya tenaga fungsional.
 - c. Sarana kerja masih terbatas.
3. PELUANG (OPORTUNITIES).
 - a. Letak geografis yang strategis.
 - b. Angkatan kerja tersedia dan peluang kerja.
 - c. Peluang investasi semakin terbuka.
 - d. Adanya pelabuhan embarkasi TKI.
4. TANTANGAN (THREATS).
 - a. Masuknya angkatan kerja dari luar karimun.
 - b. Persaingan Naker secara bebas.



Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian, maka dapat dirumuskan isu – isu petiing yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Perumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja. Isu – isu ini harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Selama Tahun 2015 ini ditemui beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun antara lain :

3.1.1 Faktor Internal :

1. Masih belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Dukungan sarana dan prasarana dinas yang masih belum mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya.
3. Keterbatasan alokasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang teranggarkan.
4. Masih kurang lengkapnya dukungan data fuktual guna memenuhi indikator target sasaran organisasi mengakibatkan pengukuran kinerja kurang maksimal.
5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektoral terkait, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

6. Belum terpenuhinya pegawai pada bidang-bidang yang spesifik, seperti pegawai fungsional pengantar kerja. Jika dilihat dari sisi tenaga kerjanya, maka permasalahannya adalah masih rendahnya keterampilan sehingga seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

3.1.2 Faktor Eksternal

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pertambahan jumlah penduduk berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja). Dengan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja maka jumlah angkatan kerja juga akan meningkat. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja atau tenaga kerja.

Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan tentang kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan mendapatkan penghasilan baik berupa uang atau barang.

Semakin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan besaran yang mempengaruhi angka TPAK sehingga tingginya Angkatan Kerja Tidak Diimbangi dengan Peningkatan Kesempatan Kerja.

2. Kualitas / Daya Saing Tenaga Kerja Lokal dibanding dengan Tenaga Kerja Luar Daerah.

Masih kurangnya kualitas tenaga kerja lokal baik dari tingkat pendidikan maupun kemampuan (skill) dibanding tenaga kerja dari luar sehingga terdapat kesenjangan dan tidak sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja maka untuk misi dan visi SKPD akan mengedepankan Sumber Daya Manusia khususnya tenaga kerja lokal.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan dan mereka yang telah diterima kerja tetapi belum mulai bekerja disebut menganggur. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan umum ketenagakerjaan di Indonesia. Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Karimun. Pada umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di daerah pedesaan

belum dianggap masalah yang serius, karena masih adanya sektor alternative (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan dapat membawa dampak kedaerah perkotaan. Lebih jauh tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas disuatu daerah.

Jika Tingkat Pengangguran Terbuka semakin besar, maka kesempatan kerja akan semakin kecil dan sebaliknya jika TPT semakin kecil maka kesempatan kerja akan semakin besar (berdasarkan data dari BPS, TPT tahun 2014 sebesar 6,64%, tahun 2015 sebesar 5,59% dan angka perkiraan tahun 2016 sebesar 5,20%).

4. Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

- Masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- Masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.
- Masih banyak terjadi Perselisihan Hubungan Industrial.
- Masih Banyak Perusahaan tidak memahami arti kelembagaan Ketenagakerjaan

5. Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat

- Masih minimnya teknologi pengolahan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) sesuai dengan pasar modern.

3.2 Isu – isu Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan salah satu komponen dari Pemerintah Kabupaten Karimun turut serta dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara umum keadaan yang digambarkan di atas sangat perlu diadakan perubahan menuju keadaan yang lebih ideal, guna mewujudkan good governance dimana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai pelayanan dibidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang menjalankan fungsi controlling diharapkan dapat mewujudkan good governance.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan realisasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2016 - 2021 serta mencermati perkembangan pencapaian kinerja indikator, maka beberapa penentuan isu - isu strategis dan masalah mendesak yang senantiasa menjadi fokus perhatian dalam

penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Karimun terutama di bidang tenaga kerja dan industri.

Isu – isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. KETENAGAKERJAAN

1.1 Jumlah Angkatan Kerja yang tidak seimbang dengan Kesempatan Kerja

Kabupaten Karimun merupakan daerah berpenduduk yang akan berkembang dan tentunya akan semakin ramai . Dengan jumlah penduduk yang semakin ramai disatu sisi bisa merupakan dijadikan modal dasar yang sangat menguntungkan, karena tersedianya tenaga kerja untuk berbagai sektor usaha. Namun demikian, jika jumlah penduduk yang ramai/besar tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai dapat menimbulkan permasalahan, Indonesia khusus Kabupaten Karimun merupakan salah satu daerah yang menghadapi masalah tersebut. Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah berupaya menerapkan program wajib belajar 9 tahun, pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), pemberian beasiswa dan lain-lain. Program tersebut setidaknya telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya penduduk Indonesia yang bisa sekolah sampai kejenjang perguruan tinggi dan mendapat gelar sarjana. Sayangnya keberhasilan di bidang pendidikan tersebut belum bisa di ikuti oleh keberhasilan di bidang lapangan kerja. Jumlah lapangan kerja yang tersedia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan lulusan tenaga kerja terdidik. Akibat adanya ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Tentu saja hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan agar cita-cita pembangunan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 tersebut dapat segera tercapai.

1.2 Kualitas Tenaga Kerja

Semakin banyaknya lulusan tenaga terdidik dan jenjang pendidikan perguruan tinggi, tidak menjadikan otomatis para lulusan dapat memenuhi kriteria yang ditawarkan oleh perusahaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas para lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih rendah, sehingga para perusahaan lebih suka mengisi kekosongan lowongan di perusahaan dengan tenaga kerja yang

sudah berpengalaman. Meskipun demikian, tentu ada para lulusan yang berkualitas dan dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan namun jumlahnya relatif lebih sedikit.

1.3 Penyebaran Tenaga Kerja

Salah satu sebab terjadinya ketidakmerataan tenaga kerja adalah adanya keberatan dari para orang tua untuk melepaskan putra-putrinya pergi merantau. Mereka lebih merelakan putra-putrinya bekerja di daerahnya meskipun dengan kompensasi yang kecil atau bahkan bekerja pada lapangan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Falsafah “Makan tidak makan yang penting ngumpul” telah menghambat aliran tenaga kerja secara merata.

1.4 Ketidaksesuaian Tenaga Kerja

Salah satu fungsi manajemen adalah ketepatan perusahaan untuk menempatkan pekerja agar sesuai dengan pekerjaannya. Seorang tenaga kerja yang dapat bekerja sesuai dengan keahliannya, maka ia akan dapat bekerja dengan efektif, efisien dan merasa nyaman, sehingga ia dapat memberikan kualitas dan kuantitas yang baik bagi perusahaan. Namun faktanya di Indonesia masih banyak sekali ditemukan orang-orang yang bekerja tidak sesuai dengan keahliannya. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan seperti kurangnya lapangan kerja, sehingga seorang tenaga kerja mengorbankan pengetahuan dan keterampilannya hanya dengan alasan “Untuk mengisi waktu dari pada menganggur”.

1.5 Upah Tenaga Kerja

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk yang sangat tinggi, mempunyai jumlah angkatan kerja yang melimpah. Namun sayangnya hal tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Hal tersebut telah mengakibatkan tingginya tingkat penawaran tenaga kerja dan menurunkan tingkat permintaan tenaga kerja. Berdasarkan hukum penawaran dan permintaan, jika jumlah penawaran lebih besar daripada permintaan maka harga yang diberikan akan turun. Begitu juga dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Upah yang diterima oleh para pegawai di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan upah para pegawai di Negara-negara lain.

1.6 Perlindungan Tenaga Kerja

Seorang tenaga kerja ketika bekerja tentunya berhadapan dengan berbagai resiko yang harus dihadapi dan diterimanya. Baik itu resiko kecelakaan kerja maupun resiko pemutusan hubungan kerja (PHK) Negara Indonesia masih terkategori sebagai Negara yang belum baik dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja, baik pekerja yang bekerja didalam negeri maupun di luar negeri. Biasanya pemerintah baru akan memberikan reaksi setelah resiko kerja yang dialami oleh para pekerja tersiar melalui media masa.

2. PERINDUSTRIAN

2.1 Terbatasnya Sarana dan Prasarana Produksi di Bidang Perindustrian

Keterbatasan sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian terutama terjadi pada IKM sehingga tidak dapat memberikan output yang maksimal.

2.2 Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan yang tersedia

Permasalahan permodalan juga terutama dialami oleh IKM dalam pengembangan usaha, terutama untuk pemenuhan alat produksi.

2.3 Rendahnya kerjasama (kemitraan) antara pelaku IKM dengan perusahaan-perusahaan berskala besar khususnya BUMN dan swasta nasional lainnya.

2.4 Terbatasnya Ketersediaan daya listrik untuk industrl.

Jumlah ketersediaan daya listrik untuk kebutuhan industry belum memadai. disebabkan belum adanya penambahan daya PLN yang dikhususkan untuk industri, sedangkan pihak swasta (Karimun Power Plant & SOMA) baru akan beroperasi pada tahun 2017 dengan total daya diperkirakan mencapai 100 MW.

3.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3.1 VISI DAN MISI KABUPATEN KARIMUN

A. VISI

Visi sangat penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna

mewujudkan kondisi akhir yang dicita citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah :

- a) Sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan.
- b) Sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan.
- c) Sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan
- d) Sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

B. MISI.

Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM YANG TERDEPAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"

Pengertian dari masing-masing kata kunci yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. "Pusat Pertumbuhan"

Memiliki arti bahwa Kabupaten Karimun sebagai kawasan strategis nasional berbentuk Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBP) yang memerankan dirinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain didalam Kabupaten dan antar daerah sekelilingnya. Sebagai lokomotif penggerak, maka pusat pertumbuhan ini memerankan fungsinya melalui pemusatan kegiatan industri manufaktur dan perdagangan serta peningkatan nilai tambah bagi komoditas unggulan lokal.

2. "Berbasis Maritim"

Menandakan kehendak untuk mengoptimalkan rahmat yang dimiliki Kabupaten Karimun yaitu sumber daya kelautan dan perikanan yang unggul baik dalam bentuk barang (seperti produk perikanan) maupun jasa (seperti alur pelayaran), mulai dari

hulu hingga hilirnya, mulai dari sektor primer hingga tersier, sebagai modal guna mewujudkan rakyat yang semakin sejahtera.

3. **“Terdepan”**

Merujuk pada dua hal, pertama adalah posisi geostrategis Kabupaten Karimun yang menjadi kawasan perbatasan Negara, perbatasan laut dengan Negara Singapura dan Malaysia. Menggunakan pengertian dari kacamata posisi geostrategis ini, maka “terdepan” juga menandakan makna bahwa kawasan perbatasan Negara tidak lagi menjadi halaman belakang melainkan harus menjadi beranda depan Negara yang representative dan atraktif. Dan hal ini dimulai dari Kabupaten Karimun. Kedua, “terdepan” juga merujuk pada kondisi yang lebih maju yang hendak diukir oleh Pemerintah Daerah pada periode lima tahun mendatang, khususnya kemajuan dalam bidang ekonomi, infrastruktur, social budaya, lingkungan hidup dan reformasi birokrasi.

4. **“Berlandaskan Iman dan taqwa”**

Memiliki arti bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya untuk membangun manusianya, khususnya dari sisi akhlak dan moral yang bersumber pada nilai-nilai agama. Membangun manusia yang sehat, cerdas dan terampil perlu tetapi belum cukup untuk mewujudkan manusia seutuhnya jika tidak diiringi dengan membangun akhlak yang baik dan moral yang terjunjung. Upaya ini menjadi semakin menemukan konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran informasi menjadi semakin terbuka, sehingga nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi penapis dari berbagai pengaruh negatif sekaligus memperkuat insane yang berakhlakul karimah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2016-2021 tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (Terdepan dalam Daya Saing)
2. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan pertanian. (Terdepan dalam Bidang Ekonomi)
3. Memperkuat konnktivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan. (Terdepan dalam Infrastruktur)
4. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah. (Terdepan dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan)

5. Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. (Terdepan dalam Melestarikan Lingkungan Hidup)
6. Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa. (Terdepan dalam Budaya dan Keagamaan)
7. Mewujudkan birokrasi yang professional, bersih dan melayani. (Terdepan dalam Pelayanan Birokrasi)

Untuk mewujudkan visi, misi dan prioritas pembangunan tersebut juga dijunjung slogan **“BERSIH”** yaitu; **Beriman, Sehat, Indah dan Harmonis**. Bersih dalam hal ini baik secara lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, baik bersih dalam dimensi lahir maupun bathin. dimana untuk menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terdepan pasti memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial, sehingga Kabupaten Karimun harus dibawa untuk mempersiapkan diri baik secara fisik, sosial maupun landasan spiritual.

Untuk melaksanakan slogan tersebut maka telah ditetapkan pula 4(empat) azam sebagai motor penggerak pembangunan yaitu:

Azam Peningkatan Iman dan Taqwa

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertikal yang kokoh sehingga pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab.

Azam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada.

Azam Pembangunan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan.

Azam Pengembangan Seni dan Budaya

Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya Melayu yang merupakan ciri khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar.



3.3.2 Tugas dan Fungsi OPD Terkait Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun menyusun Rencana Strategis tahun 2016 - 2021 dalam rangka untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karimun, adapun Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karimun yang menjadi prioritas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Karimun Periode 2016 – 2021 yang menjadi prioritas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

MISI 4	MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT CERDAS DAN KOMPETITIF SERTA MENJAWAB KEBUTUHAN DARAH			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas Guna Menekan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dengan dukungan program pelatihan ketrampilan sesuai dengan karakteristik daerah	Kebijakan Menyediakan tenaga kerja lokal yang terlatih sesuai standar kompetensi global Sehingga memenuhi kebutuhan pasar kerja	1. Peningkatan dan Kesempatan Perluasan Kerja 2. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja



3.4 Penetapan Isu – isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 4 isu strategis urusan ketenagakerjaan dan Perindustrian di kabupaten Karimun diantaranya :

1. Kualitas/skill tenaga kerja lokal yang perlu ditingkatkan khususnya sehingga bisa bersaing dengan tenaga kerja luar.
2. Menempatkan Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten sesuai pasar kerja serta memperluas kesempatan kerja.
3. Masih minimnya perlindungan terhadap tenaga kerja seperti Upah minimum Kabupaten (UMK), kasus perselisihan dan kesejahteraan tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
4. Masih minimnya pelaku industri kecil dan menengah (IKM) terhadap teknologi pengolahan yang sesuai dengan pasar modern.



4.1. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

A. VISI

Visi sebagai suatu keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan melalui suatu proses dan sistem yang terstandarisasi akan memacu suatu lembaga atau institusi untuk mencapai kondisi ideal yang diinginkan. Kondisi ideal yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Karimun telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016. Untuk itu sebagai bagian integral dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, maka perwujudan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian diselaraskan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, adalah :

”Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim Yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa”

B. Misi

Misi merupakan alasan keberadaan untuk apa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ada dilingkungan masyarakat. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang diselaraskan dengan misi Kabupaten Karimun yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi tersebut.

Lebih jauh pernyataan misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi organisasi tersebut. Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang diselaraskan pada misi Kabupaten Karimun terdapat pada misi ke-4 yaitu :

Misi ke-4 Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan kompetitif serta menjawab kebutuhan daerah (Terdepan dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan).

Uraian Misi ke-4 Yakni :

“Sumber daya manusia yang sehat, cerdas” adalah sumber daya manusia yang secara fisik jasmani sehat, serta memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk itu, dua sektor utama yang paling berperan guna membangunnya adalah sektor kesehatan dan pendidikan. Kompetitif” dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan angkatan kerja pendatang, khususnya pada posisi-posisi yang membutuhkan keterampilan sedang hingga tinggi. Dengan semakin terbukanya Kabupaten Karimun, ditambah lagi dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, maka membangun daya saing angkatan kerja lokal menjadi semakin mutlak untuk dikedepankan. Menjawab kebutuhan daerah” dimaksudkan sebagai standar kualifikasi angkatan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari sektor-sektor yang berkembang dan akan dikembangkan di Kabupaten Karimun. Diantara sektor-sektor tersebut, penekanan khusus perlu diberikan pada kebutuhan dari sektor industri manufaktur, perikanan, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan. Termasuk dari “menjawab kebutuhan daerah” adalah berkembangnya wirausahawan-wirausahawan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri baik pada sektor industri pengolahan, perikanan, perkebunan, maupun pertanian tanaman pangan.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Karimun sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun tahun 2016-2021

A. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.



B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan program dan kegiatan prioritas secara terukur yang bertujuan untuk memudahkan dalam pertanggungjawaban dan sebagai pedoman melaksanakan program tahunan sampai lima tahun dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang saat ini dan memprediksikannya pada keadaan yang akan datang dengan tetap mengemban amanah terwujudnya Kabupaten Karimun yang maju, mandiri dan berdaya saing.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun. Berikut tujuan sasaran dan indikator sasaran pada tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Karimun Tahun 2017 s.d 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
					2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan RPJMD								
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas Guna Menekan Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial		Meningkatnya Pertumbuhan tenaga kerja lokal	- Persentase Peningkatan penerimaan tenaga kerja lokal	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
				- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,19	60,45	60,71	60,96	61,22
	Tujuan OPD								
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas Guna Menekan Kemiskinan Dan Kesenjangan	Tingkat Pengangguran Terbuka			6,66	6,15	5,66	5,17	4,70
			Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	- Tingkat Pertumbuhan Wirausaha Baru	4	8	11	13	15



	Sosial		Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang Berkompeten	- Persentase Peningkatan Tenaga Kerja lokal yang bersertifikat kompetensi	14,3	14,8%	15,4%	15,9%	16,2%
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	- Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di luar PPHI	25%	27%	29%	30%	32%
				- Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	34,30%	34,70%	35%	35,40%	35,70%
3.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Disnakerin	Indeks Pemantapan Reformasi Birokrasi			17 Nilai	18 Nilai	20 Nilai	25 Nilai	30 Nilai
			Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Disnakerin	- Nilai Akip Disnakerin	>70	>70	>70	>70	>80



5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

A. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

B. Kebijakan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi ditempuh serangkaian kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun 2016-2021 yakni perbaikan iklim ketenagakerjaan dan Perindustrian mengembangkan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Meningkatkan keahlian, keterampilan dan daya saing pencari kerja. Serta penumbuhan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Dalam mencapai pembangunan Kabupaten Karimun lima tahun ke depan, maka terdapat strategi dan kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan Kebijakan

Visi TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM YANG TERDEPAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA								
Misi 4. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Kompetitif Serta Menjawab Kebutuhan Daerah								
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RPJMD								



Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dengan dukungan program pelatihan ketrampilan sesuai dengan karakteristik daerah	Membangun dan mengembangkan Balai Latihan kerja (BLK) yang melayani pelatihan keterampilan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan keutuhan penerima kerja yang dilengkapi dengan tanaga pendidik yang kompeten, perlengkapan yang memadai			X	X	X	X
		Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat diberbagai bidang	X	X	X	X	X	X
		Menyiapkan kualitas tenaga kerja lokal yang memenuhi standar kompetensi global	X	X	X	X	X	X
RENSTRA								
Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja di Berbagai Lapisan Masyarakat.	Mendayagunakan tenaga kerja produktif, melalui program khusus bagi kelompok angkatan kerja tertentu, seperti tenaga kerja terdidik, penganggur dan setengah penganggur	X	X	X	X	X	X
	Mendorong Pelaku Industri Kecil dan Menengah atau Usaha Mikro untuk Meningkatkan Mutu dan Standar Produk Menjadi Produk Yang Terstandar Dan Tersertifikasi	Membangun dan menyediakan Sentra IKM serta menyediakan Informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat Sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan	X	X	X	X	X	X
	Penciptaan Produk Turunan Baru dan Unggulan Bagi IKM	Melakukan arahan, binaan, dan membuka informasi pengolahan produk perikanan	X	X	X	X	X	X
	Peningkatan Kualitas Produk IKM Hasil Pertanian	Mensosialisasikan kepada pelaku IKM untuk menerapkan manajemen standar mutu perusahaan	X	X	X	X	X	X
		Melaksanakan sistem pengawasan terhadap kualitas dan standar mutu produk IKM	X	X	X	X	X	X
	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM yang bersertifikat BNSP	Meningkatkan dan Menyediakan tenaga kerja lokal yang yang memenuhi standar kompetensi global sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja	X	X	X	X	X



Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja	Mendorong keserikatan dan collective bargaining antara pekerja dan pemberi kerja agar lebih efektif dalam Meningkatkan Produktivitas, Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja	Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis serta mendorong keserikatan dan Collective Bargaining antara pekerja dan pemberi kerja demi meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja seperti mengurangi perselisihan, pemenuhan UMK dan terpenuhinya Jaminan Sosial Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X
---	--	--	---	---	---	---	---	---



RENSTRA

BAB 6

Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan

Untuk Mencapai tujuan, sasaran serta melaksanakan strategi dan kebijakan yang dirumuskan pada Bab IV dan V diatas serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagai lembaga pelayanan masyarakat dalam hal pembangunan daerah, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kaupaten Karimun telah menetapkan proram-program pembangunan yang dalam hal ini diklasifikasikan kedalam program teknis dan generic. Program teknis adalah program utama pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sedangkan program generic adalah progam yang sifatnya memberikan dukungan terhadap program teknis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Periode tahun 2016 – 2021 ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun telah merencanakan 13 Program yang terdiri dari 5 (lima) Program Teknis dan 8 (delapan) Program Generik/Pendukung. Adapun Program-program dimaksud antara lain :

A. Program Teknis yakni :

1. Program Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja.
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

B. Program Generik/Pendukung yakni :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Pengembangan Data/Informasi



7. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
8. Program Evaluasi dan Pelaporan

Berikut diuraikan tujuan dan indikasi kegiatan masing-masing program

1) Program Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja

Tujuan : Meningkatkan Kesempatan dan Perluasan Kerja

Pagu Program 356 s/d 1.270 (Juta Rupiah)

Indikasi Kegiatan :

1. Operasional Informasi Pasar Kerja
2. Padat Karya Produktif
3. Tenaga Kerja Mandiri
4. Teknologi Tepat Guna (TTG)
5. Teknologi Tepat Guna (TTG) II
6. Sosialisasi Rekrutmen Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) di Kabupaten Karimun
7. Mendeteksi dan Mobilisasi Kesehatan bagi Tenaga Kerja dari penyakit menular seksual (HIV/AIDS) di wilayah Kab Karimun
8. Pelaporan dan Sinkronisasi Data Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kabupaten Karimun
9. Sosialisasi HIV/AIDS Bagi Pekerja

2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tujuan : Meningkatkan Pengembangan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pagu Program 400 s/d 2.185 (Juta Rupiah)

Indikasi Kegiatan :

1. Pelatihan Pengolahan Hasil Laut
2. Pengembangan Pemasaran Produk IKM melalui Packing House
3. Pelatihan Kerajinan Tangan berbahan Baku Lokal
4. Pelatihan Aneka Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)



5. Pelatihan dan Sertifikasi Halal Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Bimtek Industri Bagi Aparatur Daerah
7. Penyusunan RPIK
8. Pelatihan AMT (Achievement Motivation Training)
9. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian
10. Pelatihan CEFE
11. Pelatihan GKM
12. Gelar Promosi Produk Unggulan Daerah
13. Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah
14. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan bagi Calon Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
15. Pembangunan Sentra IKM

3). Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Tujuan : Meningkatkan Teknologi Modern Bagi Industri Kecil dan Menengah

Pagu 100 s.d 800 (Juta Rupiah)

Indikasi Kegiatan :

1. Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG)
2. Pengadaan Peralatan Produksi Berbahan Baku Ikan
3. Pengadaan Peralatan Produksi Berbahan Baku Pandan
4. Pengadaan Peralatan Produksi Pengelolaan Rumput Laut
5. Pelatihan Pembuatan Mesin Penggiling dan Penyaring Kedelai
6. Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Pertanian
7. Pelatihan Pembuatan Alat Produksi Berbasis Maritim

4) Program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Tenaga Kerja Lokal

Pagu 2.430 s/d 3.880 (Juta Rupiah)

Indikasi Kegiatan :



1. Pelatihan dan Sertifikasi Las Lanjutan
2. Pelatihan Operator Alat Berat
3. Pelatihan dan Sertifikasi Rigger
4. Pelatihan Listrik
5. Pelatihan dan Sertifikasi Listrik
6. Pelatihan dan Sertifikasi Fitter
7. Pelatihan dan Sertifikasi Scaffolding
8. Pelatihan dan Sertifikasi Mekanik (Pesawat Angkat dan Angkut)
9. Pelatihan Gada PRATAMA (Satpam)
10. Pendampingan Pengiriman Peserta Ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
11. Pengadaan APD untuk Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Roro Parit Rampak Kec. Meral
12. Pengadaan Prasarana Balai Latihan Kerja dan Training Centre Kel. Pamak Kec. Tebing
13. Pelatihan Las Lanjutan
14. Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat dan Angkut
15. Pelatihan Fitter
16. Pelatihan Ahli K3 Umum
17. Pelatihan dan Sertifikasi K3 Kebakaran
18. Pelatihan dan Sertifikasi Gadya Madya
19. Pelatihan Bekerja di Ketinggian
20. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) di Wilayah Kab Karimun
21. Pelatihan Pemagangan Tenaga Kerja ke Luar Negeri
22. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)
23. Sosialisasi HIV/AIDS Bagi Pekerja
24. Pelatihan Pemagangan Tenaga Kerja
25. Inventarisasi Kebutuhan Pelatihan di Desa, Kelurahan dan Perusahaan
26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja
27. Pengadaan Peralatan Balai Latihan Kerja



28. Pelatihan Scaffolding

29. Pelatihan Las Dasar

5) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tujuan : Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis

Pagu 760 s/d 1.200 (Juta Rupiah)

Indikasi Kegiatan :

1. Pembinaan Dewan Pengupahan Kab. Karimun
2. Pembinaan Lembaga Kerja Sama Tripartit
3. Bimtek Tata Cara Perundingan Bipartit
4. Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
5. Sosialisasi jaminan Sosial Ketenagakerjaan
6. Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7. Bimtek Struktur dan Skala Upah
8. Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan
9. Bimtek Tata Cara Perundingan PKB
10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Syarat dan Norma Kerja
11. Bimtek Syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain
12. Pembinaan Sarikat Pekerja / Sarikat Buruh
13. Verifikasi Sarikat Pekerja / Sarikat Buruh
14. Penyebar Luasan Struktur dan Skala Upah

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Disnakerin

Pagu 35 s/d 40 (Juta Rupiah)

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
2. Pengukuran Indikator Kinerja Disnakerin



7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan yang Sinergi

Pagu 280 s/d 360 (Juta Rupiah)

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
2. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
3. Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) OPD
4. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (Makro)
5. Penyusunan Feasibility Study BLK
6. Penyusunan DED BLK
7. Penyusunan Kajian Lingkungan BLK
8. Pengembalian Batas Lahan untuk BLK
9. Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rencana Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun
10. Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD
11. Evaluasi Renstra

8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pegawai dalam melaksanakan Tupoksinya

Pagu 1.300 s/d 1,400 (Juta Rupiah)

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan : Meningkatkan Disiplin Aparatur Disnakerin

Pagu 100 s/d 600 (Juta Rupiah)

Indikasi Kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Pengadaan Partisi



3. Pengadaan Meubeler
4. Pengadaan Mobil Operasional Kantor

10) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan : Meningkatkan Disiplin Pegawai Disnakerin

Pagu 38 s.d 40 (Juta Rupiah)

Indikasi Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

11) Program Pengembangan Data/Informasi

Tujuan : Mewujudkan informasi Publik

Pagu 100 s/d 150 (Juta Rupiah)

Indikasi Kegiatan :

1. Operasional WEB Ketenagakerjaan dan Perindustrian
2. Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Perindustrian

12) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Tujuan : Mewujudkan Tatat Kelola Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

Pagu 75 s/d 100 (Juta Rupiah)

Indikasi Kegiatan :

1. Pengawalan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Pembangunan Infrastruktur dan SDM di Wilayah Kabupaten Karimun
2. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
3. Penyusunan Revisi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

13) Program Evaluasi dan Pelaporan

Tujuan : Mewujudkan Capaian Kinerja Pemerintah

Pagu 100 s/d 150 (Juta Rupiah)



Indikasi Kegiatan :

1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kabupaten Karimun
2. Pelaporan dan Sinkronisasi Data Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kabupaten Karimun
3. Sosialisasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Penjabaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif tergambar pada tabel 6.1 dan 6.2 berikut ini :



Tabel 6.1
Rencana Program dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Karimun

NO	TUJUAN	SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET					PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										BIDANG
					2017	2018	2019	2020	2021			2017		2018		2019		2020		2021		
												Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja lokal	Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja	Berkembangnya Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	4%	8%	11%	13%	15%	Program Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja	Persentase tenaga kerja Lokal yang diterima di perusahaan	35%	365,000,000	36%	86,000,000	37%	1,225,000,000	38%	1,130,000,000	39%	1,270,000,000	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
										Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rata - rata Penyebaran IKM	2%	400,000,000	4%	940,000,000	6%	1,150,000,000	8%	22,490,000,000	10%	2,185,000,000	Bidang Industri
										Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Jumlah IKM yang menggunakan Teknologi	5 IKM	100,000,000	5 IKM	250,000,000	5 IKM	800,000,000	5 IKM	400,000,000	5 IKM	200,000,000	
			Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	Persentase Peningkatan tenaga kerja lokal yang berkompetensi	14,3 %	14,8 %	15,4 %	15,9 %	16,2 %	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang bersertifikat Kompetensi	100%	2,430,000,000	100%	1,085,000,000	100%	2,350,000,000	100%	4,035,000,000	100%	3,880,000,000	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan bagi Tenaga Kerja	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial di luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri (PPHI)	25%	27%	29%	30%	32%	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan melalui Perjanjian Bersama (PB)	70%	760,000,000	71%	630,500,000	72%	820,000,000	73%	750,000,000	74%	1,200,000,000	Bidang HI, Syarat dan Norma Kerja



				Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	30%	50%	65%	78%	83%		Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	69%		70%		71%		72%		73%		
				Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	34,3 %	34,7 %	35%	35,4 %	35,7 %		Persentase perusahaan yang aktif dalam lembaga ketenagakerjaan	68%		69%		70%		71%		72%		
											Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan yang terbentuk	2 Lembaga		2 Lembaga		2 Lembaga		2 Lembaga		2 Lembaga		
											Jumlah Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan	52 Perusahaan		52 Perusahaan		52 Perusahaan		52 Perusahaan		52 Perusahaan		
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Disnakerin	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Disnakerind	Meningkatnya Capaian Kinerja	Nilai Akip	>70	>70	>70	>70	>80	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Akip	>70	35,000,000	>70	70,000,000	>70	25,000,000	>70	25,000,000	>80	25,000,000	Sekretariat
				Persentase usulan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	20%	20%	25%	25%	30%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	20%	360,000,000	20%	1,600,000,000	25%	260,000,000	25%	260,000,000	30%	280,000,000	



Meningkatnya Pelayanan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan adm perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Rencana Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000	100%	1,400,000,000
Meningkatnya Pengelolaan Asset Disnakerin	Persentase Asset Disnakerin dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran	100%	599,700,000	100%	16,500,000	100%	220,000,000	100%	150,000,000	100%	100,000,000
Meningkatnya Disiplin Pegawai Disnakerin	Tingkat Displin Pegawai	95%	96%	97%	97%	99%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Displin Pegawai	95%	37,500,000%	96%	40,000,000	97%	40,000,000	97%	40,000,000	99%	40,000,000
Terwujudnya Informasi ketengakerjaan dan perindustrian bagi Publik	Persentase dalam melaksanakan pemutakhiran Data/Informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase OPD dalam melaksanakan Pemutakhiran Data/Informasi	100%	50,000,000	100%	130,942,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000
Terwujudnya Tata Kelolaan yang baik	Produk Hukum Daerah yang diterbitkan	1 Produk				2 Produk	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Produk Hukum Daerah yang diterbitkan	1 Produk	75,000,000					2 Produk	150,000,000		
Terwujudnya Pelaporan Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	100 %	100 %				Program Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	100%	100,000,000	100%	160,000,000						



Tabel 6.2
Rencana Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Karimun

NO	TUJUAN	SASARAN	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET					PROGRAM	KEGIAT AN	INDIKAT OR KEGIAT AN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA (2016)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										BIDANG
						2017	2018	2019	2020	2021					2017		2018		2019		2020		2021		
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja lokal	Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja	Berkembangnya Wirausaha Baru	Meningkatnya Penempatan dan Pertumbuhan wirausahabaru	Persentase Penyebaran Wirausaha Baru Per-kecamatan	1%	1%	1,5%	1,5%	2%	Program Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja	Operasional Informasi Pasar Kerja	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	86,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	130,000,000	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
					Padat Karya Produktif	Jumlah Peserta		20 Orang	150,000,000					20 Orang	100,000,000	20 Orang	150,000,000								
					Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah Peserta		20 Orang	150,000,000				20 Orang	100,000,000	20 Orang	100,000,000	20 Orang	150,000,000							
					Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Peserta						20 Orang	130,000,000	20 Orang	130,000,000										
					Teknologi Tepat Guna (TTG) II	Jumlah Peserta						15 Orang	150,000,000	15 Orang	150,000,000	15 Orang	150,000,000								
					Sosialisasi Rekrutmen Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) di Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta							30 Orang	100,000,000											



											Mendete ksi dan Mobilisas i Kesehat an bagi Tenaga Kerja dari penyakit menular seksual (HIV/AID S) di wilayah Kab Karimun	Jumlah Tenaga Kerja							150 Orang	150,000,000				150 Orang	150,000,000	
											Pelapora n dan Sinkronis asi Data Tenaga Kerja Indonesi a dan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kabupat en Karimun	Jumlah Dokume n							1 Dokum en	45,000,000	1 Dokum en	50,000,000	1 Dokum en	90,000,000		
											Sosialis asi HIV/AID S Bagi Pekerja	Jumlah Peserta									50 Orang	50,000,000				
											Padat Karya Produktif II	Jumlah Peserta							30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000		
											Tenaga Kerja Mandiri II	Jumlah Peserta							30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000		
											Tenaga Kerja Infrastruk tur II	Jumlah Peserta							30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000		
		Tumbuhnya Industri Kecil dan Menengah	Terlaksana nya Pelatihan dan Penyuluha n untuk penumbuh	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan dan Pelatihan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Program Pengembang an Industri Kecil dan Menengah	Pelatihan Pengola han Hasil Laut	Jumlah Peserta		10 Orang	75,000,000	20 Orang	200,000,000			20 Orang	120,000,000				Bidang Industri	



				an IKM	Adanya Sentra IKM	-	-	-	1 Unit	-		Pengem- bangan Pemasar- an Produk IKM melalui Packing House	Jumlah Lokasi		2 Lokasi	75,000,000	2 Lokasi	90,000,000	3 Lokasi	150,000,000	3 Lokasi	150,000,000	3 Lokasi	100,000,000	
												Pelatihan Kerajina- n Tangan berbaha- n Baku Lokal	Jumlah Peserta				35 Orang	150,000,000					20 Orang	150,000,000	
												Pelatihan Aneka Industri Bagi Industri Kecil dan Menenga- h (IKM)	Jumlah Peserta					85 Orang	450,000,000				90 Orang	485,000,000	
												Pelatihan dan Sertifikas- i Halal Bagi Industri Kecil dan Menenga- h (IKM)	Jumlah Peserta							20 Orang	130,000,000				
												Bimtek Industri Bagi Aparatur Daerah	Jumlah Peserta										8 Orang	150,000,000	
												Penyusu- nan RPIK	Jumlah Dokume- n					1 Dokum- en	150,000,000						
												Pelatihan AMT (Achievm- ent Motivatio- n Training)	Jumlah Peserta				40 Orang	150,000,000					45 Orang	100,000,000	
												Pelatihan Pengola- han Hasil Pertania- n	Jumlah Peserta				20 Orang	200,000,000	20 Orang	150,000,000	20 Orang	150,000,000			



Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021



Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021



											Pembangunan Gudang Bahan Baku / Bahan Penolong	Jumlah Unit							1 Unit	2,200,000,000			
											Pembangunan Gedung Produksi	Jumlah Unit							1 Unit	8,400,000,000			
											Pematan Lahan	Jumlah Paket							1 Unit	330,000,000			
											Kajian Pengembangan Industri Berbahaya Lokal	Jumlah Dokumen							1 Dokumen	200,000,000			
			Meningkatnya IKM yang berinovasi dan berteknologi	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan Peralatan	5 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Expose									3 Expose	200,000,000	
											Pengadaan Peralatan Produksi Berbahaya Baku Ikan	Jumlah Jenis					6 Jenis	150,000,000					
											Pengadaan Peralatan Produksi Berbahaya Baku Pandan	Jumlah Jenis					3 Jenis	150,000,000					
											Pengadaan Peralatan Produksi Pengelolaan Rumput Laut	Jumlah Jenis					5 Jenis	150,000,000					



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Pelatihan dan Sertifikasi Mekanik (Pesawat Angkat dan Angkut)	Jumlah Peserta		20 Orang	250,000,000					20 Orang	250,000,000	20 Orang	250,000,000
Pelatihan Gada PRATAMA (Satpam)	Jumlah Peserta		35 Orang	500,000,000								
Pendampingan Pengiriman Peserta Ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja	Jumlah Peserta				100 Orang	400,000,000	100 Orang	400,000,000	100 Orang	400,000,000	100 Orang	400,000,000
Pengadaan APD untuk Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Roro Parit Rampak Kec. Meral	Jumlah Jenis				5 Jenis	80,000,000						
Pengadaan Prasarana Balai Latihan Kerja dan Training Centre Kel. Pamak Kec. Tebing	Jumlah Unit				6 Unit	130,000,000						
Pelatihan Las Lanjutan	Jumlah Peserta						20 Orang	210,000,000	20 Orang	225,000,000	20 Orang	210,000,000



Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat dan Angkut	Jumlah Peserta		20 Orang	300,000,000					20 Orang	300,000,000	20 Orang	300,000,000
Pelatihan Fitter	Jumlah Peserta						25 Orang	215,000,000	25 Orang	215,000,000		
Pelatihan Ahli K3 Umum	Jumlah Peserta						20 Orang	250,000,000	20 Orang	250,000,000	20 Orang	250,000,000
Pelatihan dan Sertifikasi K3 Kebakaran	Jumlah Peserta						20 Orang	150,000,000				
Pelatihan dan Sertifikasi Gadya Madya	Jumlah Peserta								30 Orang	400,000,000		
Pelatihan Bekerja di Ketinggian	Jumlah Peserta										20 Orang	200,000,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) di Wilayah Kab Karimun	Jumlah Pembinaan LPK dan PJK3						6 LPK	200,000,000				
Pelatihan Pemagangan Tenaga Kerja ke Luar Negeri	Jumlah Peserta						20 Orang	300,000,000	20 Orang	300,000,000	20 Orang	300,000,000



										Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	Jumlah Unit							1 Unit	5,000,000					
										Sosialisasi HIV/AIDS Bagi Pekerja	Jumlah Peserta		100 Orang	100,000,000										
										Pelatihan Pemagangan Tenaga Kerja	Jumlah Peserta					30 Orang	300,000,000							
										Inventarisasi Kebutuhan Pelatihan di Desa, Kelurahan dan Perusahaan	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	50,000,000							
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja	Jumlah Jenis							5 Jenis	250,000,000	5 Jenis	250,000,000			
										Pengadaan Peralatan Balai Latihan Kerja	Jumlah Unit							5 Unit	250,000,000	5 Unit	250,000,000			
										Pelatihan Scaffolding	Jumlah Peserta							25 Orang	200,000,000	25 Orang	200,000,000			
										Pelatihan Las Dasar	Jumlah Peserta							20 Orang	200,000,000	20 Orang	200,000,000			
		Meningkatnya Penerapan Norma Ketenagakerjaan	Terlaksananya Fasilitas Prosedur Penyelesaian	Jumlah Perselisihan HI yang terdaftar	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Pembinaan Dewan Pengupahan Kab. Karimun	Jumlah Peserta		21 Orang	378,000,000	21 Orang	200,000,000	21 Orang	250,000,000	21 Orang	300,000,000	21 Orang	300,000,000	Bidang HI, Syarat dan Norma Kerja



					Perselisihan Hubungan Industrial						aan	Pembinaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Jumlah Peserta		15 Orang	232,000,000	15 Orang	200,000,000	15 Orang	200,000,000	15 Orang	200,000,000	15 Orang	250,000,000	
										Bimtek Tata Cara Perundingan Bipartit		Jumlah Peserta									50 Orang	70,000,000			
					Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang		50 Orang	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta		100 Orang	100,000,000			100 Orang	150,000,000				
													Sosialisasi jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta										150 Orang	100,000,000
													Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Rapat		20 Rapat	50,000,000							20 Rapat	50,000,000
													Bimtek Struktur dan Skala Upah	Jumlah Peserta										50 Orang	125,000,000
													Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan	Jumlah Peserta				50 Orang	123,845,600					50 Orang	125,000,000
													Bimtek Tata Cara Perundingan PKB	Jumlah Peserta										50 Orang	70,000,000



												Monitorin g, Evalua si dan Pelapora n Syarat dan Norma Kerja	Jumlah Dokume n						1 Dokum en	50,000,000	1 Dokum en	50,000,000	1 Dokum en	50,000,000	
												Bimtek Syarat Penyera han sebagian Pelaksana an Pekerjaa n kepada Perusah aan Lain	Jumlah Peserta						100 Orang	70,000,000					
												Pembina an Sarikat Pekerja / Sarikat Buruh	Jumlah Peserta						20 Orang	100,000,000	20 Orang	130,000,000	20 Orang	130,000,000	
												Verifikasi Syarikat Pekerja / Syarikat Buruh	Jenis Kelompo k				3 Kelom pok	25,000,000							
												Penyeba r Luasan Struktur dan Skala Upah	Jumlah Peserta				50 Orang	81,500,000							
2	Mewujud kan birokrasi yang professio nal, bersih dan melayani	Mewujudka n Reformasi Birokrasi Disnakerin	Meningkatny a Capaian Kinerja Disnakerin	Terlaksana nya Penyusuna n Lakip	Rata-rata Capaian Sasaran Disnakerin	70%	75%	80%	80%	85%	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusu nan Laporan Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ahan (LAKIP)	Jumlah Dokume n		1 Dokum en	35,000,000	1 Doku men	25,000,000	1 Dokum en	25,000,000	1 Dokum en	25,000,000	1 Dokum en	25,000,000	Sekretariat
												Penguku ran Indikator Kinerja Disnakeri nd	Jumlah Dokume n				1 Doku men	44,070,000							



Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perencanaan Disnakerin	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Dokumen Perencanaan	20%	20%	25%	25%	30%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Jumlah Dokumen									1 Dokumen	20,000,000
			Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	20,000,000		1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000				
			Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) OPD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	25,000,000													
			Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (Makro)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	100,000,000		1 Dokumen	1,100,000,000										
			Penyusunan Feasibility Study BLK	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	215,000,000													
			Penyusunan DED BLK	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	335,000,000										
			Penyusunan Kajian Lingkungan BLK	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	60,000,000										
			Pengembalian Batas Lahan untuk BLK	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	80,000,000										
			Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rencana Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen						2 Dokumen	115,000,000	2 Dokumen	115,000,000	2 Dokumen	115,000,000					



Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021	70
---	-----------



									Perkantoran													
Tersedianya data/informasi Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Terlaksananya Operasional WEB	Persentase dalam melaksanakan pemutakhiran Data/Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan Data/Informasi	Operasional WEB Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,942,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000
									Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	
Mewujudkan Tata Kelolaan Pemerintahan yang baik	Terlaksananya penyusunan Produk Hukum Ketenagakerjaan	Produk Hukum Daerah yang diterbitkan	1 Produk					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pengawalan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Pembangunan Infrastruktur dan SDM di Wilayah Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	75,000,000								
									Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen							1 Dokumen	75,000,000				
									Penyusunan Revisi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen							1 Dokumen	75,000,000				

72



RENSTRA

BAB 7

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengingat keterkaitan antara Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang mana RPJMD dijadikan acuan artinya bahwa tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian harus diarahkan untuk mencapai target kinerja daerah sesuai dengan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun. Maka berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun harus berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD melalui perencanaan yang berkualitas.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,94	60,19	60,45	60,71	60,98	61,22	61,22
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	3,3	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian indikator kinerja utama OPD. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya membangun system manajemen pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu Peningkatan Kesempatan dan



Perluasan Kerja, Peningkatan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah, Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Pekerja serta kualitas pelayanan publik.

Disamping itu penyusunan IKU merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Kabupaten Karimun. Oleh Karen itu IKU Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini dapat dijadikan peremater terhadap pencapaian kinerja aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Karimun, berikut ini tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yakni :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun
Tahun 2016 - 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN
1	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja [dibagi] Jumlah Penduduk Usia Kerja [dikali] 100 persen
		2	Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	Jumlah Tenaga kerja Lokal yang diterima perusahaan [dibagi] Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang mendaftar [dikali] 100 persen
2	Meningkatnya Kesempatan dan Perluasan Kerja	1	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha baru	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha baru yang tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya [dibagi] Jumlah Pertumbuhan Wirausahabaru pada tahun sebelumnya [dikali] 100 persen
3	Meningkatnya Tenaga Kerja Lokal yang berkompeten	1	Persentase Peningkatan tenaga kerja lokal yang berkompetensi	Jumlah Tenaga Kerja [dibagi] jumlah tenaga kerja lokal yang bersertifikat BNSP [dikali] 100 persen
4	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan bagi Tenaga Kerja	1	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	Selisih jumlah kasus hubungan industrial tahun ini dikurangi dengan selisih jumlah kasus pada tahun lalu [dibagi] jumlah kasus pada tahun sekarang [dikali] 100 persen
		2	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan (dibagi) Jumlah tenaga kerja (dikali) 100 persen



Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016 -2021 yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan adalah merupakan pedoman bagi aparat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021, juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Keberhasilan pembangunan urusan ketenagakerjaan bahwa kita harus mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja Lokal yang unggul, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk menciptakan perluasan kerja serta mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) terhadap teknologi pengolahan yang sesuai dengan pasar modern.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai suatu lembaga yang harus dapat menyiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dan produktif, membina lembaga-lembaga latihan swasta, melakukan akreditasi lembaga latihan swasta serta sertifikasi berdasarkan kompetensinya sehingga dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar nasional / internasional, mampu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, mencakup pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundang-undang ketenagakerjaan, penanganan permasalahan/perselisihan ketenagakerjaan, memfasilitasi penetapan Upah Minimum Kabupaten, memberikan perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha, dengan melalui program dan kegiatan yang berorientasi terhadap peningkatan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan jaminan sosial bagi tenaga kerja, peningkatan penegakkan hukum ketenagakerjaan serta pementapan sistem pendidikan, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat calon dan pelaku usaha mikro.

Keberhasilan pencapaian RENSTRA ini akan dilakukan secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja (Renja) dan melalui upaya dan komitmen seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dan jajaran Pemerintah serta masyarakat dalam melaksanakan dan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah



ditetapkan secara sungguh-sungguh dengan prinsip kerja amanah, Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas mewujudkan masyarakat Kabupaten karimun yang unggul, nyaman, dan sejahtera.



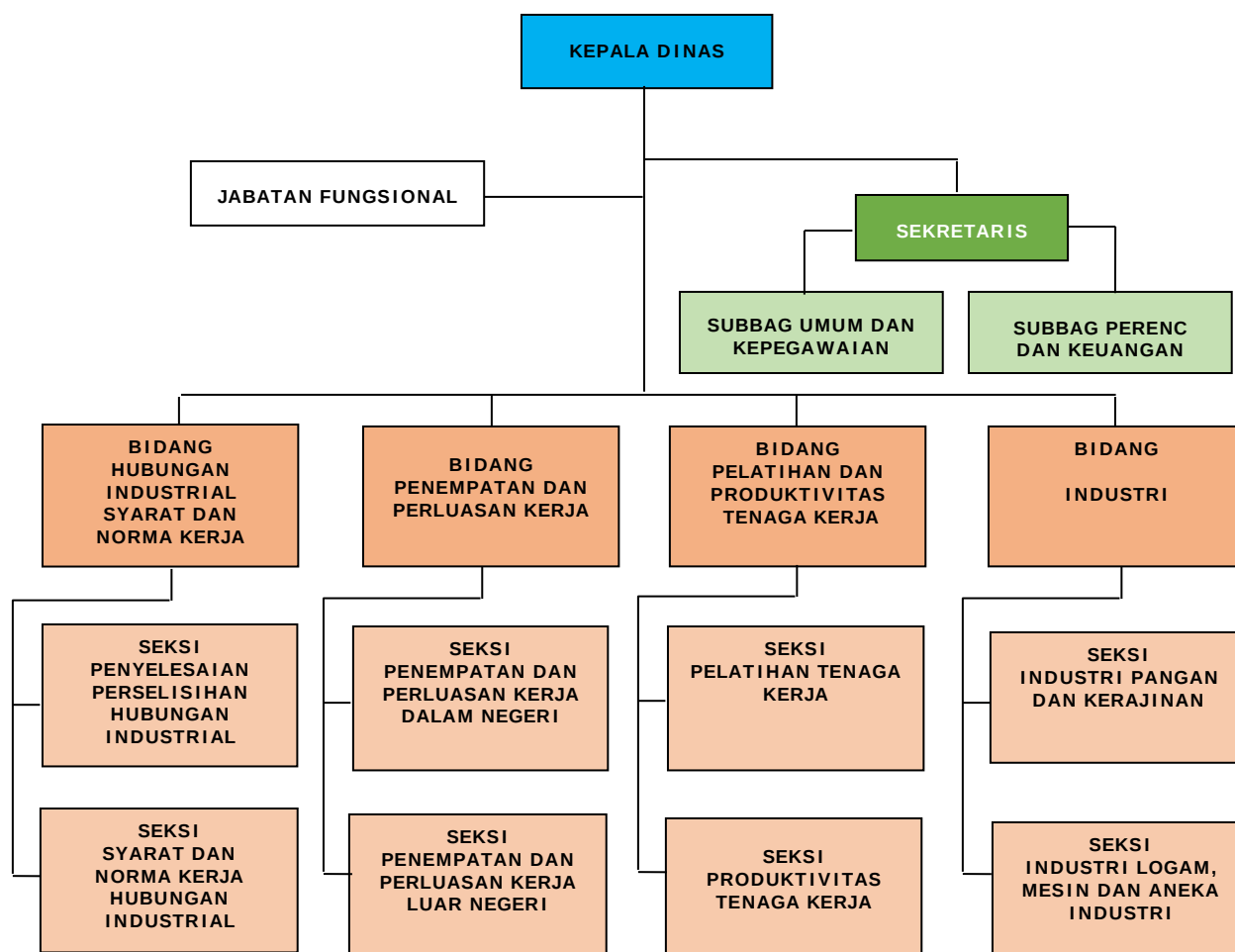
LAMPIRAN

1. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.
2. Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun



STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN

Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016





**POHON KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2016 - 2021**

MISI 4

Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan kompetitif serta menjawab kebutuhan Daerah



Tujuan

Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas guna menekan kemiskinan dan kesenjangan sosial

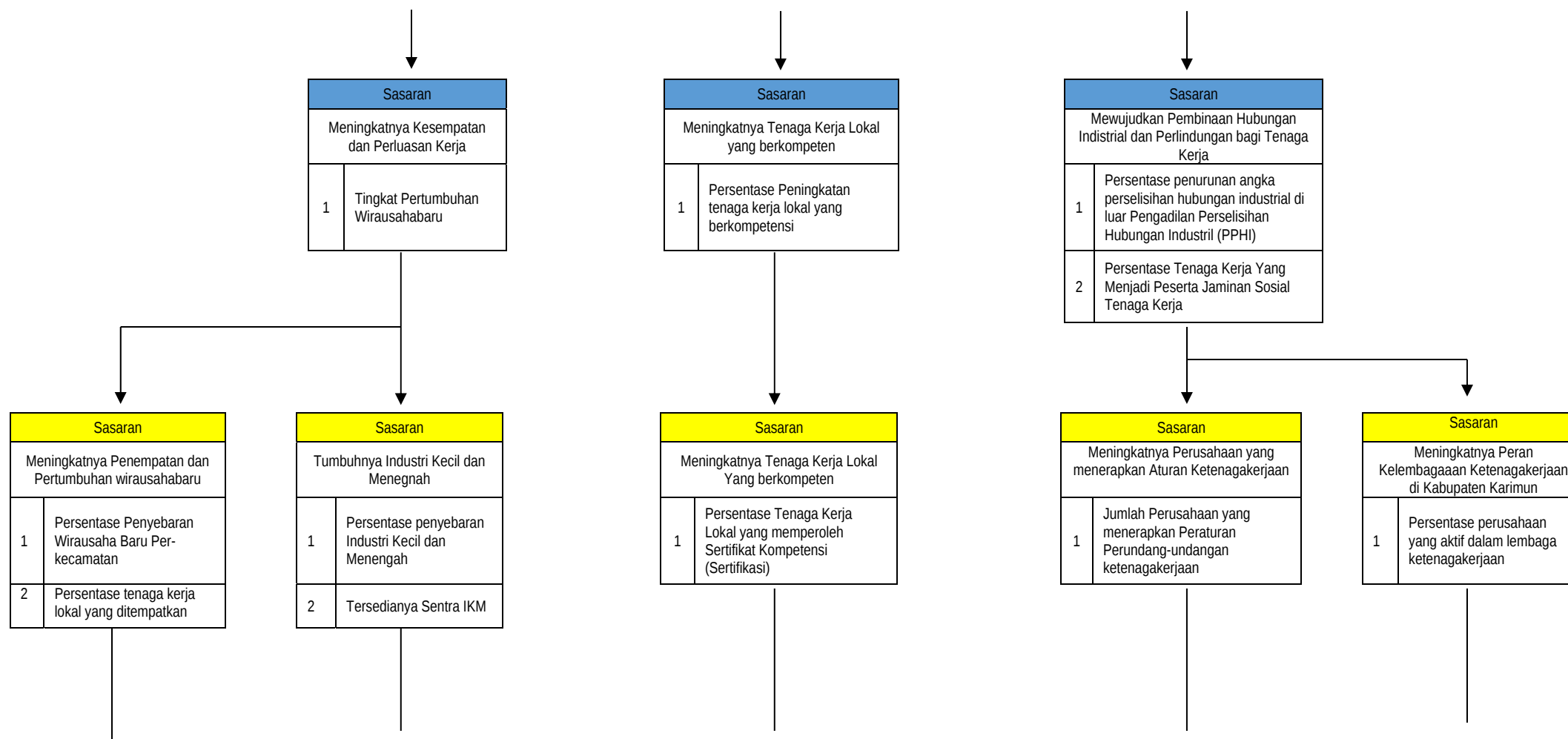
- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka |

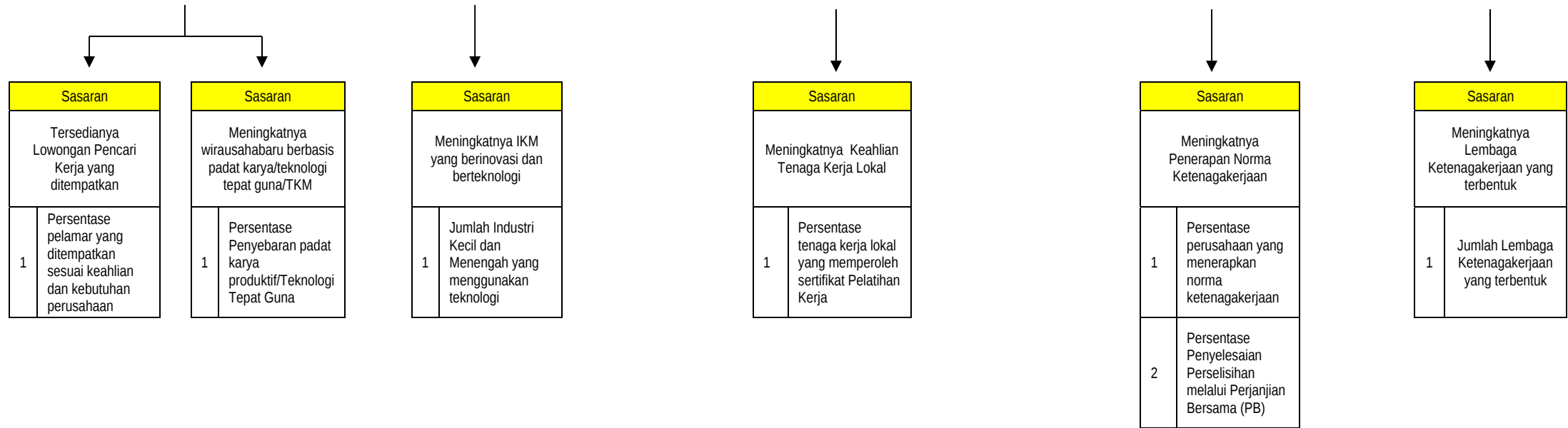


Sasaran

Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal

- | | |
|---|--|
| 1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja |
| 2 | Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal |







**POHON KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2016 - 2021**

